

PENGELOLAAN PENDIDIKAN BERBASIS KEBIJAKAN GENDER DI SALAH SATU SEKOLAH DASAR BANTEN

Ana Nurhasanah ¹, Arita Marini ², M. Syarif Sumantri³

Surel: *ananur74@untirta.ac.id*¹, *aritamari@unj.ac.id*²,
*syarifsumantri@unj.ac*³.

ABSTRACT

One of the important things that need to be considered in the management of elementary school education (SD) is to build education that is equal. From the beginning, efforts must be made to implement gender justice in primary school education. This study aims to determine the implementation of primary school education management based on gender policies and indicators of gender policy-based education management in elementary schools at SD Negeri Serdang 1, Kramatwatu District, Serang Regency. The research method used is narrative research (Cresswell, 2012), with interview techniques and documentation analysis. The results showed that the implementation of gender-based education management in primary schools has been carried out by referring to gender responsive school indicators

Keywords: Education Management, Gender Policy

ABSTRAK

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan sekolah dasar (SD) adalah membangun pendidikan yang berkesetaraan. Sejak awal harus diupayakan terlaksananya keadilan gender dalam pendidikan sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi pengelolaan pendidikan sekolah dasar yang berbasis kebijakan gender dan indikator pengelolaan pendidikan berbasis kebijakan gender di Sekolah Dasar di SD negeri Serdang 1 Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian naratif (Cresswell, 2012), dengan teknik wawancara dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan pendidikan berbasis gender di sekolah dasar sudah dilaksanakan dengan merujuk pada indikator sekolah responsif gender.

Kata Kunci: Pengelolaan Pendidikan, Kebijakan Gender

PENDAHULUAN

Pendidikan dalam pandangan tradisional dipahami sebagai bentuk pelayanan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Cara pandangan ini sekarang sudah tergusur sejalan dengan adanya pemikiran dan bukti ilmiah akan peran dan fungsi vital

pendidikan dalam memahami dan memosisikan manusia sebagai kekuatan utama prasyarat bagi kemajuan pembangunan dalam berbagai sector (Hasan, 2019:1.3).

Salah satu alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang adalah

bahwa pendidikan dapat mengembangkan sumber daya manusia suatu negara yang merupakan unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan serta untuk penggunaan yang efektif atas sumber daya modal fisiknya. Pendidikan dapat dipandang sebagai konsumsi. Pendidikan sebagai konsumsi adalah pendidikan sebagai hak dasar manusia. Sebagaimana UUD NR 1945 pasal 31 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Hasan, 2019:1.25).

UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 6 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Penyebaran APS penduduk usia SD dan SMP (7-15 tahun) di seluruh provinsi di Indonesia. APS 7-15 tahun Indonesia pada tahun 2020 sebesar 98,14 persen. Hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki APS 7-15 tahun lebih dari 95 persen.

Salah satu yang harus mendapat perhatian lebih bagi pemerintah Indonesia adalah pengelolaan pendidikan khususnya pengelolaan pendidikan sekolah dasar. Peraturan tersebut tertuang dalam peraturan menteri pendidikan nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dasar dan

Menengah. Delapan standar tersebut saling menunjang satu sama lain dalam mencapai tujuan nasional pendidikan (Utari et al., 2015: 617).

Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan sekolah dasar (SD) adalah membangun pendidikan yang berkesetaraan. Pendidikan merupakan kunci terwujudnya keadilan gender dalam masyarakat, karena pendidikan merupakan instrument untuk menstransfer norma-norma masyarakat, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat itu sendiri, termasuk nilai dan norma gender. Untuk itu sejak awal harus diupayakan terlaksananya keadilan gender dalam pendidikan. Kata "Gender" berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti "jenis kelamin". Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Didalam *Webster's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, prilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Nassaruddin Umar, 2010:29-30)

Jadi gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan sex adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah dalam gender ada perbedaan peran,

fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial (Iswah Adriana. 2009:138).

Sesuai prinsip fundamental dan pengarusutamaan gender yang diusung dalam target pencapaian SDGs 2030, kesetaraan gender juga diperlukan dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan dasar. Rasio APM menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. Rasio APM merupakan persentase APM perempuan terhadap APM laki-laki. Nilai rasio APM sebesar 100 persen menunjukkan APM perempuan sama dengan APM laki-laki, artinya kesetaraan gender sudah terwujud (Rida Agustina 2020). Adanya kesenjangan gender dalam aspek pendidikan dikarenakan oleh sosialisasi gender di sekolah dan adanya pengelolaan pendidikan masih bias gender (Baidhawi, z., I. 2005:96).

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah SD Serdang 1 di Banten yaitu bapak Amirulloh, S.Pd, mengemukakan bahwa pendidikan perlu memperhatikan kesetaraan gender dalam pengelolaannya, diantaranya ada 3 hal yang dapat dijadikan sebagai dasar, yaitu: pertama, kesetaraan gender dinyatakan sebagai prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Kedua, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, pada Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan ketiga Kemendiknas mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.

Menurutnya, indikator dalam pengelolaan pendidikan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan di sekolah dasar. Isu-isu dalam pengelolaan pendidikan diantaranya pola pembangunan yang dilakukan terfokus pada pembangunan sarana-sarana fisik, rendahnya pemerataan akses untuk mendapatkan pendidikan, serta kurangnya mutu dan kualitas pendidikan (Muhammad, Haq, and Pd, 2017:30).

Membaca urgensi pengelolaan pendidikan berbasis kesetaraan gender di SD di atas, maka perlu dikaji alternatif untuk mengembangkan program pendidikan berbasis kesetaraan gender, yaitu pertama, perlu dirumuskan pengelolaan pendidikan sekolah berbasis kesetaraan gender, sehingga ada penghormatan terhadap hak-hak anak perempuan. Kedua, perlu diimplementasikan program perwujudan kesetaraan hak pendidikan bagi anak perempuan dalam jenjang SD, kesetaraan dalam mengaktualisasikan diri dalam proses

pembelajaran. Ketiga, kesetaraan dalam mengaktualisasikan diri dalam pembelajaran.

Berdasarkan kondisi-kondisi di atas, maka penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan pendidikan sekolah dasar yang berbasis kebijakan gender dan indikator pengelolaan pendidikan berbasis kebijakan gender di Sekolah Dasar di SD negeri Serdang 1 Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian naratif (Cresswell, 2012). Dengan teknik wawancara dan analisis dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah SD dalam memperoleh informasi tentang pengelolaan pendidikan berbasis kebijakan gender, sebagai berikut: pertama, bagaimana standar pengelolaan pendidikan sekolah dasar, kedua, fungsi standar pengelolaan pendidikan, ketiga, bagaimana isu-isu bias gender dalam pengelolaan pendidikan, keempat, perencanaan pendidikan (visi dan misi sekolah) berbasis gender, kelima, pelaksanaan perencanaan kerja (kurikulum dan kegiatan pembelajaran) berbasis gender serta keenam, pengawasan dan evaluasi program berbasis gender.

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Serdang 1 Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten. Subjek penelitian adalah kepala sekolah SD Negeri Serdang 1. Analisis dokumentasi

dilakukan untuk mendapatkan data dan dokumen yang relevan dengan informasi pengelolaan pendidikan berbasis kebijakan gender, misalnya Rencana Kegiatan Sekolah (RKS), Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), buku guru dan siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Berbasis Gender

Berdasarkan informasi kepala sekolah SD Negeri 1 Serdang Banten bahwa standar pengelolaan pendidikan terdapat dalam Permendiknas No 19 Tahun 2017 meliputi perencanaan program. Visi SD negeri Serdang 1 sebagai berikut: Terwujudnya peserta didik yang berkarakter, cerdas dan tanggung jawab.

Misi adalah pertama, menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia, anti *bullying*/kekerasan, toleransi, menghargai perbedaan dan dapat hidup berdampingan penuh kasih sayang dan cinta damai. Kedua, menghasilkan peserta didik yang cinta dan bangga terdapat bangsa dan negaranya. Ketiga menghasilkan peserta didik yang bertanggung jawab dan mandiri.

Perencanaan program sekolah memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung upaya untuk mewujudkan sekolah yang berbasis gender. Sistem perencanaan pendidikan di sekolah pada umumnya kurang memperhitungkan aspek kesetaraan dan keadilan gender dalam

penyusunan rencana, pelaksanaan, serta dalam evaluasinya. Hal ini dapat dilihat dari peran dan peraturan yang seringkali tidak mencakup aksi dan sanksi yang terkait dengan masalah-masalah hubungan gender seperti ejekan (*bullying*). Sekolah Dasar negeri Serdang 1 sudah sensitif terhadap pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak perempuan seperti kebutuhan fasilitas ruang ganti khusus bagi anak perempuan pada waktu mata pelajaran PJOK, toilet yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan, dan sebagainya.

Memasukkan perspektif gender dalam kebijakan pendidikan di sekolah bukanlah pekerjaan mudah, karena berbenturan dengan berbagai kepentingan, nilai maupun keyakinan seseorang/sekelompok orang yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan. Secara garis besar ada empat faktor yang memberi kontribusi cukup kuat terhadap terintegrasinya perspektif gender dalam pendidikan di sekolah (Edi 2010:192).

Pertama, kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan pendidikan di sekolah, SDM tersebut tidak bekerja dalam ruang yang vakum, tetapi berinteraksi secara terus menerus dengan faktor-faktor di luar dirinya, sehingga membentuk keyakinan tentang penting tidaknya memasukkan gender sebagai arus utama pada kebijakan pendidikan.

Kedua, *Capacity building* dan advokasi pengarusutamaan gender di bidang pendidikan di sekolah, baik terhadap *stakeholders* pada tingkat internal maupun eksternal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan secara berjenjang dari top eksekutif hingga pelaksana di tingkat *grass root*.

Ketiga, budaya organisasi yang mengedepankan visi dan misi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Terbangunnya budaya organisasi atas dasar hubungan gender yang egaliter dapat digunakan sebagai pedoman bersikap, bertindak atau berperilaku antar antar anggota organisasi dalam mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender dalam proses formulasi kebijakan pendidikan di sekolah.

Keempat, pembentukan dan penguatan jejaring dan kemitraan akan mampu membangun proses pembelajaran bersama antar *stakeholders* dan jejaringnya sehingga menumbuhkan sensitivitas gender yang akan akan memberi kontribusi terhadap masuknya perspektif gender pada kebijakan pendidikan di sekolah.

Sedangkan ciri-ciri pengelolaan pendidikan sekolah dasar berwawasan gender, antara lain : (1). Kepemimpinan dilakukan secara horisontal dan *team work* kooperatif yang ramah terhadap perbedaan. (2). Pembagian peran atau posisi fleksibel tergantung pada kebutuhan, kesempatan, komitmen

dan kualitas serta pembakuan peran / posisi secara ketat banyak menimbulkan masalah (stereotipi, subordinasi, marginalisasi, beban lebih, kekerasan; mekanisme pengambil keputusan seimbang dan memperhatikan qouta minim 30% dari perempuan; menghargai perbedaan gaya, cara kerja laki-laki dan perempuan harus dimaknai sebagai kekuatan selama mencapai target; budaya sekolah harus menghindari perilaku yang stereotype, diskriminatif, merendahkan salah satu jenis kelamin dan; manajemen yang ramah terhadap perempuan, bahan pajangan kantor, kalender, poster, *screen* komputer tidak boleh melecehkan salah satu jenis kelamin ; mendorong dan membantu setiap individu untuk maju dan setara.

Sejumlah hasil penelitian mengungkapkan bahwa kesenjangan gender bukan diakibatkan oleh satu faktor tunggal, melainkan terdapat sejumlah faktor yang saling kait mengkait. Setidaknya, dapat disebutkan empat faktor utama, yakni faktor akses, kontrol, partisipasi dan benefit. Faktor akses terlihat nyata dalam proses penyusunan kurikulum dan proses pembelajaran yang cenderung bias lakilaki. Dalam kedua proses ini harus diakui proporsi laki-laki sangat dominan (Iswah Andriana, 2009).

Suryadi dan Idris (2004) mengkategorikan faktor-faktor kesenjangan gender bidang pendidikan ke dalam 4 aspek yaitu:

1). Akses, adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu, 2). Partisipasi adalah keikutsertaan atau peran seseorang/kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan, 3). Kontrol, adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan, 4). Manfaat, adalah kegunaan sumber yang dapat dinikmati secara optimal.

Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di bidang pendidikan terjadi karena adanya perbedaan akses bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pendidikan. Proses pembelajaran masih cenderung belum berwawasan gender dan masih bias gender. Laki-laki cenderung masih ditempatkan pada posisi yang lebih menguntungkan dalam seluruh proses pendidikan, misalnya dalam memimpin kelas, memimpin organisasi siswa, memimpin dikusi kelompok, memimpin kelompok belajar, mengajukan pertanyaan atau mengemukakan pendapat. Muatan buku-buku pelajaran yang mengungkapkan status dan fungsi perempuan dalam masyarakat juga menunjukkan muatan bahan ajar yang belum sepenuhnya peka gender.

Lingkungan sekolah dan proses pembelajaran yang peka gender dapat menumbuhkan rasa nyaman dan kodusif bagi peserta didik. Sehingga hal ini membuat peserta didik lebih siap sebagai pembelajar dan pada gilirannya akan mendorong meningkatnya mutu pembelajaran dan

prestasi peserta didik secara maksimal.

2. Indikator Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar berbasis Gender

Beberapa indikator yang bias dijadikan acuan untuk mewujudkan sekolah berwawasan gender adalah sebagai berikut:

a. Adanya pembelajaran responsif gender. Pembelajaran responsif gender adalah proses pembelajaran yang memberikan perhatian seimbang bagi kebutuhan khusus laki-laki maupun perempuan.

Indikator pembelajaran responsif gender antara lain: *Pertama*, peserta didik perempuan dan laki-laki memperoleh akses partisipasi dan manfaat yang sama dari kegiatan belajar di sekolah, tanpa terpengaruh oleh pandangan stereotipe terhadap jenis kelamin tertentu. *Kedua*, peserta didik perempuan dan laki-laki memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam belajar di sekolah. *Ketiga*, peserta didik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan cara efektif untuk berbagi pengalaman hidup yang cenderung berbeda. *Keempat*, berkurangnya pola-pola dan perilaku sekolah yang dapat memarginalkan salah satu jenis kelamin, *Kelima*, peserta didik laki-laki dan perempuan yang memiliki kesulitan belajar memperoleh pelayanan yang baik dan bermutu dari tenaga pendidik. *Keenam*, peserta didik laki-laki dan perempuan

memiliki pilihan peran yang beragam dibandingkan dengan peran-peran tradisional mereka tanpa hambatan budaya dalam kehidupan mereka melalui pembelajaran di sekolah. *Ketujuh*, bahan ajar yang ada di sekolah seperti buku teks pelajaran, buku pengayaan, buku bacaan, serta bahan dan alat peraga pengajaran terbebas dari materi yang memuat gender stereotype seperti: pembagian kegiatan domestik cenderung digambarkan dilakukan oleh perempuan, sedangkan pekerjaan di sektor publik cenderung dilakukan oleh laki-laki (Depdiknas, 2008).

b. Adanya penataan ruang kelas yang responsif gender. Tata letak ruang kelas sangat penting untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran. Hal tersebut mencakup hal-hal penting sebagai berikut :

- 1) Tata letak ruang kelas yang mencampur peserta didik laki-laki dan perempuan;
- 2) Tata letak ruang kelas yang mampu mendorong partisipasi peserta didik laki-laki dan perempuan;
- 3) Tata letak tempat duduk yang mendorong peserta didik perempuan mau dan mampu menyampaikan pendapatnya dan menghilangkan rasa malu rendah diri;
- 4) Tempat duduk di laboratorium memiliki ukuran dan bentuk yang

- nyaman untuk peserta didik laki-laki maupun anak perempuan ;
- 5) Gambar-gambar dan ilustrasi di dinding sekolah menggambarkan peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sebagai upaya untuk menyampaikan pesan yang responsif gender.
- c. Adanya manajemen sekolah responsif gender pendekatan MBS yang berbasis kesetaraan gender ini mempunyai ciri dengan indikator sebagai berikut:
- 1) Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peran yang sama atau setara dalam mengendalikan sistem pendidikan di sekolah.
 - 2) Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan peran yang sama atau setara dalam membina, mengarahkan dan melaksanakan pelayanan pendidikan di sekolah dan dapat memperoleh manfaat yang sama dari kesempatan dan peran tersebut.
 - 3) Adanya penghargaan dari sekolah terhadap hasil unjuk kerja tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan berdasarkan atas kompetensi yang di miliki tanpa terkendala oleh hambatan kultural terkait peran yang mereka jalankan.
 - 4) Tersedia data terpilah menurut jenis kelamin di sekolah sebagai dasar informasi dalam melakukan perencanaan, implementasi maupun monitoring dan evaluasi pendidikan responsif gender.
 - 5) Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk menempati jabatan struktural dan atau jabatan fungsional di sekolah;
 - 6) Sekolah memiliki sarana prasarana yang dapat diakses dan memenuhi kebutuhan khusus laki-laki dan perempuan.
- d. Adanya penggunaan Bahasa yang responsif gender. Penggunaan bahasa yang salah dapat menyampaikan pesan yang negatif dan mengganggu pembelajaran.
- e. Adanya interaksi kelas yang responsif gender. Interaksi kelas merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam mencapai keberhasilan proses pembelajaran.
- f. Tenaga pendidik yang responsif gender adalah tenaga pendidik yang memperlakukan peserta didik laki-laki dan perempuan dengan penghargaan yang sama agar mampu mendorong setiap anak untuk berpartisipasi penuh dalam proses pembelajaran,
- Tenaga pendidik perlu bersikap adil tidak hanya menyukai salah satu jenis kelamin saja. Perlakuan yang sama akan memberi kesan bahwa setiap peserta didik adalah berharga dan bernilai, terlepas dari apakah mereka laki-laki atau perempuan. Jika guru

memperlakukan setiap peserta didik secara baik, akan memudahkan bagi anak untuk mendengarkan dan akibatnya menghargai satu sama lain.

SIMPULAN

Pengelolaan pendidikan berbasis kebijakan gender di sekolah dasar berpedoman pada dan Panduan Sekolah Berwawasan Gender yang dikeluarkan oleh Kemendikbud (2014) dan Permendiknas Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun implementasinya sangat ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam perencanaan program yang meliputi pembuatan visi, misi, tujuan dan rencana kerja. Sistem perencanaan program pendidikan di sekolah memperhitungkan aspek kesetaraan dan keadilan gender dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, serta dalam evaluasinya.

Visi dan misi sekolah berbasis gender dirumuskan berdasarkan masukan berbagai pihak/*stakeholder* selaras dengan visi institusi dan pendidikan nasional yang dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang untuk dapat memberikan inspirasi, motivasi dan kekuatan pada sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan.

Pelaksanaan rencana kerja/kegiatan sekolah berbasis gender perlu didukung oleh beberapa faktor diantaranya pertama, kapasitas sumber daya manusia (SDM) paham tentang gender, memiliki sensitivitas gender dan memiliki otoritas terkait

dengan pembangunan pendidikan disekolah dengan memberi kontribusi sangat kuat terhadap terintegrasinya kesetaraan dan keadilan gender dalam kebijakan pendidikan di sekolah. Kedua, *Capacity building* dan advokasi pengarusutamaan gender di bidang pendidikan di sekolah. Ketiga, budaya organisasi yang mengedepankan visi dan misi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Serta keempat, pembentukan dan penguatan jejaring dan kemitraan yang akan akan memberi kontribusi terhadap masuknya perspektif gender pada kebijakan pendidikan di sekolah.

Indikator pengelolaan pendidikan sekolah dasar berbasis gender dalam interaksi pembelajaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: pertama, peserta didik perempuan dan laki-laki memperoleh akses partisipasi dan manfaat yang sama dari kegiatan belajar di sekolah. Kedua, peserta didik perempuan dan laki-laki memperoleh hak dan kewajiban yang sama dalam belajar di sekolah. Ketiga, peserta didik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan cara efektif untuk berbagi pengalaman hidup yang cenderung berbeda. Keempat, berkurangnya pola-pola dan perilaku sekolah yang dapat memarginalkan salah satu jenis kelamin, Kelima, peserta didik laki-laki dan perempuan yang memiliki kesulitan belajar memperoleh pelayanan yang baik dan bermutu dari tenaga pendidik. Keenam, peserta

didik laki-laki dan perempuan memiliki pilihan peran yang beragam dibandingkan dengan peran-peran tradisional mereka tanpa hambatan budaya dalam kehidupan mereka melalui

DAFTAR RUJUKAN

- Depdiknas. 2008. *Panduan Sekolah Berwawasan Gender*. Jakarta : Depdiknas.
- Hasan, Said Hamid. 2019. *Kebijakan Dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar*. 6th ed. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Ismi Dwi Astuti. 2010. *Pendidikan Adil Gender Konsep Dan Aplikasi Di Sekolah*, UNS: Press Parawansa
- Iswah Adriana. 2009. *Kurikulum Berbasis Gender*, Tadrís. Volume 4. Nomor 1. 2009 (Diakses: Senin, 22 Maret 2021)
- Kemendikbud. 2014. *Indikator Sekolah Responsif Gender*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kemendiknas. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan* Matin. (2014). *Manajemen Pembiayaan pembelajaran di sekolah*. Dan ketujuh, bahan ajar yang ada di sekolah terbebas dari materi yang memuat gender stereotype.
- Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Faishal Haq, and M. I. Pd. 2017. “ Analisis Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar Dan Menengah”. *Evaluasi*. 1(1):26–41
- Nassaruddin Umar. 2010. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Rida Agustina, at all, ed. 2020. *Statistik Pendidikan Indonesia 2020*. Jakarta.
- Utari, Fitriana Dwi, Hanni Hanifah, Siti Wulandari, and Universitas Sebelas Maret. 2015. “Pemetaan Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (Snp), Ketuntasan Belajar Berbasis Ujian Nasional , Dan Proses Pembelajaran Di.” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sains (SNPS)* (November):616–24